

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

Oleh :

MUHAMMAD NABIL AL FURQON MARPAUNG

NIM : 0502162105

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Meraih
Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

MUHAMMAD NABIL AL FURQON MARPAUNG

NIM : 0502162105

PROGRAM STUDI

AKUNTANSI SYARIAH



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung
Nim : 0502162105
Tempat/tgl.lahir : Kisaran, 01 September 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Halat Simp. Megawati No.16 Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 22 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Mhd. Nabil Al Furqon Marpaung

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS SISTEM PENGENADALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN
PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

Oleh:

Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung

NIM. 0502162105

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Program Studi S1 Akuntansi Syariah

Medan, 29 Januari 2020

Pembimbing I



Dr. Zuhri M. Nawawi, MA

NIDN. 2018087601

Pembimbing II



Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak.

NIDN. 2014068000

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A

NIDN. 2001077903

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN” a/n. Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung, NIM. 0502162105, Prodi Akuntansi Syariah telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 26 Februari 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah.

Medan, 8 Juli 2021

Panitia sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,



(Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA)

NIDN. 2001077903

Sekretaris,



(Hendra Harmain, M.Pd)

NIDN. 2010057302

Anggota



1. (Dr. Zuhri M. Nawawi, MA)

NIDN. 2018087601



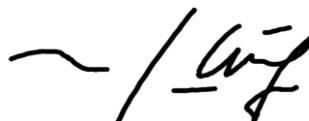
2. (Kusmilawaty, S.E, Ak. M. Ak)

NIDN. 2014068000



3. (Hendra Harmain, M. Pd)

NIDN. 2010057302



4. (Arnida Wahyuni Lubis, M. Si)

NIB. 1100000089

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung, NIM: 0502162105, Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Dibawah bimbingan Pembimbing I Bapak Dr. Zuhrial M. Nawawi, MA dan Ibu Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Hasil sistem pengendalian internal kas dan seberapa sesuai dengan sistem pengendalian yang terdapat pada PP No.60 Tahun 2008. Sistem pengendalian internal dapat dikatakan baik apabila sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal pemerintahan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan *Mixed Method* yang menggunakan dua metode yaitu kualitatif dan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis data hasil observasi penelitian ini menggunakan metode komparatif berupa persentase. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan sudah baik dilihat dari hasil daftar checklist melalui wawancara dengan hasil 80,55% yang berarti sistem pengendalian internal kas sudah sesuai.

Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kas.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuni-Nya berupa kesehatan serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat bertangkaikan salam senantiasa penulis limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah: Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari yang namanya hambatan, keluh kesah penulis serta segala masalah yang penulis jadikan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan demi untuk melanjutkan kesuksesan dimasa yang akan datang. Penulis mengucapkan banyak Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan do'a sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis Ayahanda Ahmad Kosim Marpaung, S.Ag, M.Si dan Ibunda Eka Haryati S.Ag, yang selalu memberikan banyak nasihat, dukungan, do'a, dan perhatian nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.

Selain itu, dalam menyelesaikan skripsi ini penulis juga banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, M.A selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Kamilah, S.E, AK, M.Si selaku penasehat akademik yang turut membantu penulis dalam proses perkuliahan dan penyusunan proposal skripsi.
5. Bapak Dr. Zuhrial M. Nawawi selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Kusmilawaty, S.E, Ak, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas segala didikan dan bantuannya selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Keluarga yang sangat penulis cintai Abi, Umi, Saudara Kandung Penulis yaitu Muhammad Naufal Al Faruq Marpaung, Siti Naila Tunnazihah, Muhammad Nazif Ar Rantisy Marpaung, dan Muhammad Nasir Ghalib Marpaung, yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, serta nasihat-nasihat serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada hal yang memberi tahuku apa itu sedih, apa itu bahagia, yaitu Indah Puji Lestari selaku rekan partner. Selama kami memulai hal yang baik untuk saat ini dan seterusnya.
9. Dan Teruntuk Sepupu Terhebatku Siti Isti Anah, sahabatku bedoll, amek, yang sudah menghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta Kawan-Kawan Seperjuangan Penulis Muhammad Ary Ked, Riyan Utama Kompek, Rizky Abdillah Boy, Sofwan Arsona Ateng yang selalu memberikan dukungan dan saling Support diantara kami. Terimakasih untuk pertemanan yang sudah terjalin selama 4 tahun ini.
10. Seluruh teman-teman Seperjuangan Akuntansi Syariah C angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu berjuang bersama dalam proses perkuliahan.

11. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berterimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam selesainya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, Kritik dan Saran sangat diperlukan untuk membangun dan lebih menyempurnakan lagi skripsi ini, terakhir penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya. Aaminn Ya rabbal'alamin.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2021

Penulis

Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis.....	6
1. Pengendalian Internal.....	6
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal	6
b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal	9
c. Prinsip Pengendalian Internal	9
2. Kas	11
a. Pengertian Kas	11
b. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas	12

3. Sistem Pengendalian Internal Kas.....	15
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Kas	15
b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Kas	15
c. Pengendalian Internal Dalam Islam.....	16
B. Penelitian Terdahulu	18
C. Kerangka Konseptual	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	22
C. Subjek Dan Objek Penelitian	22
D. Jenis Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
1. Observasi.....	24
2. Wawancara.....	24
3. Dokumentasi	25
F. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
1. Sejarah Singkat Instansi	28
2. Visi dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.....	29
3. Struktur Organisasi	29
B. Hasil Penelitian	
1. Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan	32
a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan	32

b.	Prosedur Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan.....	39
c.	Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan.....	40
2.	Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dengan Sistem Pengendalian yang terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008	45
a.	Hasil Daftar Checklist Penelitian.....	45
b.	Kelemahan dan Kelebihan Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan	46
a)	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan	46
b)	Kelebihan Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan	48
C.	Pembahasan	49
1.	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan	49
a.	Lingkungan Pengendalian	49
b.	Perkiraan Resiko Yang Muncul	50
c.	Kegiatan Pengendalian	50
d.	Informasi dan Komunikasi	51
e.	Pemantauan	52
2.	Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dengan Sistem Pengendalian Internal yang terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 56
B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA 58

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Penelitian Terdahulu	18
3.1 Data Narasumber	24
4.1 Hasil Daftar Checklist	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
2.1 Kerangka Konseptual	20
4.1 Struktur Organisasi	31
4.2 Prosedur Penerimaan Kas	40
4.3 Bagan Alir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan.....	42
4.4 Bagan Alir Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini, semua aktivitas bisnis maupun pemerintahan dan juga sebuah instansi dilakukan dengan sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang menerima masukan data dan instruksi, mengolah data tersebut sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Dengan adanya sistem informasi, maka akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Akan tetapi, informasi yang begitu canggih perlu didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat.¹

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan pondasi yang kokoh dimana setiap instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi (lingkungan pengendalian) yang mendorong perilaku positif dalam manajemen yang sehat. Utamanya adalah mendorong seluruh pengelola aset negara untuk memiliki kesadaran yang kuat tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern. Salah satu sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah adalah sistem pengeluaran kas. Sistem ini menangani pengeluaran kas yang terjadi secara rutin pada sebuah lembaga pemerintahan. Penerapan sistem pengeluaran kas pada lembaga pemerintahan sangatlah penting, mengingat kas adalah aset yang mudah berubah dibandingkan dengan aset lain, sehingga kas merupakan alat pembayaran yang bebas dan selalu siap sedia untuk digunakan.²

Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling likuid (paling lancar), yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial suatu instansi. Kas yang dibutuhkan oleh sebuah instansi baik digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari (dalam bentuk modal kerja) maupun pembelian aktiva tetap, memiliki sifat continue (untuk pembelian bahan baku, membayar

¹ Virasty Fitri F.H, “Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan”, Jurnal Akuntansi Vol 3, No 2, 2016, Hal 2.

² Fanda D.P. Rundengan, “Analisis Pendapatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Kas Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 3, 2016, Hal 368.

upah dan gaji, membayar supplies kantor habis pakai, dll) dan tidak continue (untuk pembayaran deviden, pajak, angsuran hutang, dsb). Tujuan dari menyimpan kas yakni untuk sebuah kebutuhan transaksi (diperlukan dalam pelaksanaan operasi instansi tersebut).³

Kas juga bisa diartikan sebagai aktiva yang berbentuk uang tunai (uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya) yang dipegang maupun disimpan di Bank dan bisa digunakan untuk kegiatan umum. Kas juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kas merupakan aset yang paling likuid, kas dapat digunakan sebagai standar pertukaran yang paling umum dan kas dapat digunakan sebagai basis perhitungan dan pengukuran.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan sendiri merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan membantu Bupati dalam mengelola Pendapatan Daerah di daerah Kabupaten Asahan. Tugas instansi ini membutuhkan suatu pengelolaan yang efektif dan efisien. Dengan berperannya kas dalam kegiatan instansi, maka instansi tersebut harus memastikan bahwa apakah pengelolaan kas sudah berjalan dengan baik. Penulis akan membahas tentang Sistem Pengendalian Internal Kas. Alasannya untuk menghindari penyalahgunaan kas pada manajemen, mencerminkan transparansi dari transaksi keuangan, melindungi harta instansi tersebut dan untuk mendukung produktivitas instansi, dan untuk mengetahui seberapa besar penerapan pengendalian intern instansi sejak dari penerimaan kas sampai pengeluaran kas menciptakan prosedur-prosedur akuntansi yang dapat mencegah timbulnya penyelewengan, penipuan, penggelapan, pemborosan terhadap harta kekayaan instansi, atau praktek-praktek lain yang dapat merugikan instansi pemerintahan tersebut.

Kepemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan

³ <https://sarjanaekonomi.co.id/pengertian-kas> (diakses pada tanggal 25 November 2020, Pukul 19:08 WIB)

aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari setiap instansi pemerintah agar terciptanya lingkungan yang dapat memacu perilaku yang positif dan manajemen yang baik. Terutama dapat mendorong seluruh pihak agar memiliki tanggung jawab dan kesadaran tentang pentingnya penegakan sistem pengendalian intern.⁴

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dialami setiap instansi, dalam hal ini pengelolaan kas sangat memerlukan suatu sistem yang dapat secara efektif dan efisien membantu mengawasi dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Sistem tersebut dinamakan sistem pengendalian intern kas. Pengendalian intern kas dimaksud untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan oleh pihak pegawai sendiri dalam instansi atau dimaksudkan untuk mengamankan serta melindungi aset negara. Pengendalian intern kas mencakup penerimaan dan pengeluaran kas.⁵

Didalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh. Dalam hal ini Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dituntut untuk dapat melaksanakan efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam melaksanakan tuntutan tersebut pimpinan harus dapat melaksanakan pengawasan secara menyeluruh agar tidak terjadi kesalahan dan kebocoran. Data akuntansi merupakan salah satu jalan keluar dalam menghadapi masalah tersebut.

Melalui uraian diatas penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas menjadi salah satu agenda penting yang perlu diperhatikan setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan laporan keuangan yang handal dan akurat.

⁴ Gabriella Margaretha, "Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 04, 2015, Hal 279.

⁵ Mahfiza, "Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Pengelolaan Kas", Jurnal Al-Buhuts Vol. 1 No. 1, 2018, hal 112-113.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan penulis menemukan permasalahan yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan yaitu tidak terdapat pemisahan fungsi penerimaan kas. Hal ini bertentangan dengan unsur-unsur pengendalian internal kas yaitu adanya pemisahan fungsi penerimaan kas dengan fungsi pengeluaran kas.⁶

Berdasarkan landasan pikiran di atas, maka dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Belum sepenuhnya menggunakan sistem pengendalian internal yang sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008.
2. Tidak terdapat pemisahan fungsi penerimaan kas.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian ini, penulis hanya berfokus pada beberapa masalah, yaitu:

1. Analisis sistem pengendalian internal kas pada badan pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan.
2. Kesesuaian analisis sistem pengendalian internal kas pada badan pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang akan penulis bahas dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan?

⁶ Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, wawancara di Kisaran pada tanggal 5 Agustus 2020.

2. Bagaimana kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dengan Sistem Pengendalian Internal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan (BAPPENDA) Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dengan PP No. 60 Tahun 2008.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberikan sumbangan literatur, bahan bacaan dan refrensi atau bahan kajian dalam ilmu pengetahuan tentang yang berhubungan dengan pengendalian internal kas.

2. Bagi Akademis

Menambah perbendaharaan perpustakaan sehingga dapat acuan mahasiswa yang akan mendapatkan penelitian selanjutnya terutama yang berhubungan dengan Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas.

3. Bagi Pembaca

Sebagai masukan dan pertimbangan yang nantinya dapat bermanfaat sebagai refrensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam membuat *paper* di tahun-tahun mendatang yang berkaitan dengan Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sebelum memahami pengertian sistem pengendalian, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian sistem. Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain.⁷ Sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang disusun dalam rangkaian secara menyeluruh untuk melaksanakan berbagai kegiatan atau fungsi pokok dalam suatu badan usaha.⁸

Sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan, yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.⁹

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong di patuhinya kebijakan manajemen.¹⁰

Pengertian pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.¹¹ Pengendalian dapat juga diterjemahkan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹²

⁷ Sumarsan Thomas, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja* (Jakarta Barat: PT Indeks, 2013), h.2

⁸ Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang* (Jakarta : Grafindo, 2002), h.1

⁹ Baridwan Zaki, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta : BPFE UGM, 2002) h.1

¹⁰ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (ed.4), (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 129.

¹¹ T. Hani Handoko, *Manajemen* (Yogyakarta, 2009), h.359

¹² Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h.242.

Adapun pengertian sistem pengendalian internal menurut *The Committee of Sponsoring Organization (COSO)* adalah proses yang dapat dipengaruhi manajemen dan karyawan dalam menyediakan secara layak suatu kepastian mengenai prestasi yang diperoleh secara objektif dalam penerapannya tentang bagian laporan keuangan yang dapat dipercaya, diterapkannya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan operasional perusahaan dan diterapkannya peraturan dan hukum yang berlaku agar ditaati oleh semua pihak.¹³

Sistem pengendalian intern adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau di jalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.¹⁴

Pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting sekali dalam pencapaian tujuan usaha. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian intern. Pengendalian intern adalah semua rencana organisasional, metode dan pengukuran yang dipilih oleh suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan.¹⁵

¹³ Nida Umun Sulistia, “Analisis Sistem Pengendalian Internal (SPI) Klien Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan” dalam *Jurnal Analisis Akuntansi*, AAJ 1 (3), 2013, h. 117.

¹⁴ Hery, *Siklus Akuntansi Perusahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 195.

¹⁵ Anastasia dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Proses dan Penerapan*, (Jakarta: Andi, 2015), h. 82.

Pengendalian internal adalah “rencana organisasi serta beberapa metode dan prosedur yang diadopsi perusahaan dalam rangka melindungi asetnya dan meninggalkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.”¹⁶

Dalam arti yang luas, Sistem Pengendalian Intern dapat dipandang sebagai sistem sosial (social system) yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat – alat fisik, dokumentasi orang – orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk :

- 1) Melindungi harta;
- 2) Menjamin terhadap “terjadinya utang yang tidak layak”;
- 3) Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi;
- 4) Dapat diperolehnya operasi secara efisien, dan;
- 5) Menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) Sistem Pengendalian Internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan - ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan.¹⁷

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

¹⁶ Jerry J. Weygandt, et. al, *Accounting Principles*, (ed. 7), Terj. Ali Akbar Yulinto, Wasilah, dan Rangga Handika, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 454.

¹⁷ Bambang Hartadi, *Sistem Pengendalian Intern*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 3.

keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁸

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses kebijaksanaan atau prosedur yang dijalankan oleh pihak manajemen, dewan direksi, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan perusahaan mencakup keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi, serta menjaga aktiva perusahaan.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang rasional atas tercapainya tujuan:

- 1) Reliabilitas Pelaporan Keuangan;
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan; dan
- 3) Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada.¹⁹

c. Prinsip Pengendalian Internal

Untuk dapat mencapai tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi prinsip dasar pengendalian intern yang meliputi :

a. Pembentukan tanggung jawab

Karakteristik penting dalam pengendalian intern adalah penyerahan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian akan paling efektif jika seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu.

¹⁸ Gabriella Margaretha, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 04, 2015, Hal 280.

¹⁹ Priska Claudya Homenta, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara”, Jurnal EMBA Vol. 3 No. 3, 2015, Hal 779.

b. Pemisahan tugas

Pemisahan tugas atau disebut juga pemisahan fungsi sistem pembagian kerja, merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem pengendalian intern. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini:

1. Aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbeda-beda;
2. Penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas aset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik aset tersebut.

c. Prosedur dokumentasi

Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah terjadi.

d. Pengendalian Fisik, Mekanik, dan Elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik adalah penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga melindungi aset, sebagian mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.

e. Verifikasi Internal Independen

Sebagian besar pengendalian memberikan verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari verifikasi internal independen:

1. Verifikasi seharusnya dilaksanakan setiap priodik atau mendadak;
2. Verifikasi seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang independen atas karyawan yang bertanggung jawab atas informasi terkait;
3. Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan ditingkat manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.

f. Pengendalian Lainnya

Pengendalian lainnya meliputi:

1. Mengikat karyawan yang memegang kas;

2. Merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan untuk mengambil cuti.²⁰

2. Kas

a. Pengertian Kas

Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Tidak ada standard akuntansi khusus terkait dengan kas namun secara umum dibahas dalam standard tentang instrument keuangan.²¹

Keberadaan kas dalam entitas sangat penting karena tanpa kas, aktivitas operasi perusahaan tidak dapat berjalan. Entitas tidak dapat membayar gaji, memenuhi utang yang jatuh tempo dan kewajiban lainnya. Entitas harus menjaga jumlah kas agar sesuai dengan kebutuhannya. Jika jumlah kas kurang, maka kegiatan operasional akan terganggu. Terlalu banyak kas, menyebabkan entitas tidak dapat memanfaatkan kas tersebut untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi.

Kas termasuk instrumen keuangan dalam klasifikasi aset keuangan. Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan entitas. Kas terdiri atas uang kartal yang tersimpan dalam sebuah entitas, uang tersimpan dalam rekening bank dan setara kas. Kas secara umum digunakan sebagai alat pembayaran untuk aktivitas operasi perusahaan tanpa suatu pembatasan. Ada kalanya kas dimiliki untuk tujuan tertentu sehingga tidak bebas digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Kas yang dicadangkan dengan penggunaan khusus tidak boleh dikategorikan sebagai kas, tetapi diklasifikasikan sebagai dana cadangan. Jika digunakan untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun dana cadangan ini akan diklasifikasikan sebagai aset lancar.

²⁰ Jerry J. Weygandt, et. al, *Accounting Principles*, h. 455-460.

²¹ Dwi Martani dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hal. 182.

Kas yang dicadangkan untuk kegiatan khusus yang akan digunakan lebih dari satu tahun diklasifikasikan dalam aset tidak lancar.

Kas dan setara kas menurut PSAK No. 2 menyatakan bahwa: “Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.”²²

Kas terdiri dari koin, uang kertas, cek, wesel atau kiriman di tangan melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank, dan uang tunai ditangan atau simpanan di bank atau semacam deposito.²³

Dari beberapa pengertian kas tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kas merupakan aktiva lancar perusahaan yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan dan dapat dengan mudah diselewengkan sehingga harus dijaga.

b. Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas

1) Penerimaan Kas

Untuk mengontrol penerimaan kas seorang pimpinan memerlukan informasi informasi mengenai sumber penerimaan kas. Informasi-informasi tersebut sangat berguna dalam menerapkan sistem pengendalian intern penerimaan kas, yaitu bagaimana cara mengamankan penerimaan kas agar tidak diselewengkan mengemukakan bahwa sumber penerimaan kas dalam satu perusahaan pada dasarnya dapat berasal dari :

- a) Hasil transaksi investasi jangka panjang;
- b) Transaksi atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas;
- c) Pengeluaran surat tanda bukti hutang baik hutang jangka pendek (wesel) maupun jangka panjang (hutang obligasi, hutang hipotik, atau hutang jangka panjang lain), serta bertambahnya hutang yang diimbangi dengan penerimaan kas;

²² Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 2.

²³ Jerry J. Weygandt, et. al, *Accounting Principles*, h. 462.

- d) Adanya penurunan atau berkurangnya aktiva lancar selain kas yang diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya adanya penerimaan pembayaran, berkurangnya persediaan barang dagangan karena adanya penjualan secara tunai;
- e) Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari investasinya sumbangan atau hadiah maupun adanya pengendalian kelebihan pembayaran pajak periode – periode sebelumnya.

Memberikan sistem pengendalian intern dalam penerimaan kas sebagai berikut:

- a) Menetapkan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan fisik;
- b) Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup;
- c) Semua penerimaan tunai dibuatkan nota penerimaan yang sudah diberi nomor urut atau dicatat dalam mesin cash register;
- d) Daftar penerimaan uang harus cocok dengan jurnal penerimaan uang;
- e) Tembusan nota transaksi tunai harus dikirim ke kasir dan bagian pengiriman;
- f) Bukti setoran ke Bank setiap hari disesuaikan dengan daftar penerimaan uang harian dan catatan dalam jurnal penerimaan uang;
- g) Kasir tidak boleh merangkap mengerjakan buku pembantu utang dan piutang dan sebaliknya;
- h) Semua penerimaan uang harus disetor pada hari itu juga atau pada awal hari kerja berikutnya;
- i) Rekonsiliasi laporan bank harus dilakukan oleh orang yang tidak berwenang menerima uang ataupun yang menulis cek;
- j) Diadakan notasi pegawai agar tidak timbul kerjasama berbuat kecurangan.

2) Pengeluaran Kas

Untuk mengontrol pengeluaran kas dengan baik, maka seorang pimpinan memerlukan informasi-informasi mengenai penggunaan atau pengeluaran kas. Mengemukakan bahwa penggunaan atau pengeluaran kas disebabkan adanya transaksi-transaksi sebagai berikut :

- a. Pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek maupun jangka panjang serta adanya pembelian aktiva tetap;
- b. Adanya pengembalian kas perusahaan oleh pemilik perusahaan atau yang berwenang;
- c. Pelunasan atau pembayaran angsuran hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang;
- d. Pembelian dagangan secara tunai, adanya pembayaran biaya operasi yang meliputi upah dan gaji, pembelian supplies kantor, pembayaran sewa, bunga premi, asuransi, advertensi, dan adanya persekot-persekot biaya maupun persekot pembelian;
- e. Kas pengeluaran untuk pembayaran deviden (bentuk pembagian laba lainnya secara tunai), pembayaran pajak, denda-denda dan lain sebagainya.

Kewajaran pengeluaran kas yang merupakan bentuk dari pengendalian intern sebagai berikut :

- a. Sebelum faktur pembelian disetujui untuk dibayar, harus dilakukan pemeriksaan perhitungan – perhitungan dalam faktur dan dokumen – dokumen pendukungnya;
- b. Jumlah saldo-saldo dalam buku pembantu piutang harus cocok dengan saldo rekening kontrolnya dan dengan surat pernyataan piutang dari penjual (kreditur);
- c. Semua pengeluaran uang harus dengan cek kecuali untuk pengeluaran-pengeluaran kas kecil dan dibentuk dana kas kecil dengan imprest system;
- d. Penanda tangan cek harus dipisahkan dari orang yang memegang buku cek dan cek untuk pengisian kas kecil dan gaji harus dibuat atas nama penerima;
- e. Harus ada tanggung jawab dari pemegang buku cek tentang nomor-nomor cek yang digunakan untuk membayar dan yang dibatalkan;

- f. Tanggung jawab penerimaan uang harus dipisahkan dari tanggung jawab atas pengeluaran uang; (tidak berlaku untuk lembaga-lembaga keuangan seperti bank)
- g. Rekonsiliasi laporan bank dilakukan oleh petugas yang tidak menandatangani cek atau menyetujui pengeluaran;
- h. Persetujuan pengeluaran harus didukung dengan faktur dari penjual yang sudah disetujui dan dokumen pendukung lainnya;
- i. Sesudah dibayar, semua dokumen pendukung harus dicap lunas atau dilubangi agar tidak digunakan lagi;
- j. Transfer uang antar bank harus dengan izin khusus dan dibuatkan rekening perantara.²⁴

3. Sistem Pengendalian Internal Kas

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal Kas

Mendefinisikan sistem sebagai serangkaian komponen yang di koordinasikan untuk mencapai tujuan. Kemudian Mendefinisikan sistem adalah merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan yang ditujukan kepada sistem tersebut sampai menghasilkan keluaran yang diinginkan. Lebih lanjut, sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen yang berusaha mencapai tujuan tertentu. Sistem pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kehandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.²⁵

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal Kas

Pada hakikatnya, organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen. Jika manajemen puncak merasa bahwa

²⁴ Mahfiza, “Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Pengelolaan Kas”, Jurnal Al-Buhuts Vol. 1 No. 1, 2018, hal 119-121.

²⁵ Ibid., Hal. 114.

pengendalian internal itu penting maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal tersebut dan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dilain pihak, jika pengendalian internal tidak dijadikan kepentingan utama manajemen puncak maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian internal tidak dapat dicapai dengan efektif.

Selain itu terdapat prosedur pengendalian yang merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen untuk mencapai tujuannya, antara lain:

1. Pembagian tugas yang jelas;
2. Prosedur otorisasi yang jelas;
3. Dokumen dan catatan yang memadai;
4. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan;
5. Pengecekan pelaksanaan kerja yang terpisah.

Tujuan pengendalian internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan:

1. Keandalan (reliabilitas) laporan keuangan;
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
3. Efektivitas dan efisiensi operasi.²⁶

c. Pengendalian Internal Dalam Islam

Pengawasan (pengendalian) dalam Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengkoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pembagian pengendalian dalam ajaran Islam paling tidak dibagi menjadi dua hal, yaitu :

1. Pengendalian (control yang berasal dari diri sendiri), yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah seperti yang terdapat pada Surah Al-Mujadilah : 7

²⁶ Dina Maghfirah, Skripsi: “Analisis Sistem Pengendalian Internal Dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pada PT. Bima Desa Sawita” (Medan: UINSU, 2019), Hal. 14.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *[Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu].*²⁷

2. Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti yang dilakukan sistem pada sebuah lembaga atau institusi melalui pengawasan dari manajemen yang ada.²⁸

Pengendalian Islam memiliki landasan, diantaranya:

1. *Tawa shaubil haqqi*, saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas;
2. *Tawa shaubil shabri*, saling menasehati atas dasar kesabaran, dengan kata lain pengendalian yang dilakukan berulang-ulang;

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

²⁷ Q.S. Al-Mujadalah (58):7

²⁸ Vicky Fiara Saragih, Skripsi: “Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur Cabang Medan” (Medan:UINSU, 2018), Hal. 23.

Artinya : *“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.”*²⁹

3. *Tawa shaubil marhamah*, saling menasehati atas dasar kasih sayang, yakni pengendalian dengan pendekatan secara personal dengan tujuan untuk pencegah.

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

Artinya: *“Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.”*³⁰

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya di dalam Islam pengendalian merupakan hal yang paling diperhatikan agar suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk kepentingan pribadi ataupun atas nama lembaga/instansi proses pekerjaan yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diharapkan.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan, diantaranya yaitu:

Tabel 2.1

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
----	-------------------------------	----------------------	------------------

²⁹ Q.S. Al-Ashr (103): 3

³⁰ Q.S. Al-Balad (90): 17

³¹ Fitri Mustika, Skripsi: *“Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pembiayaan Murabahah pada BMT Nusantara Berkah Sentosa Lubuk Pakam”* (Medan: UINSU, 2018) Hal. 16.

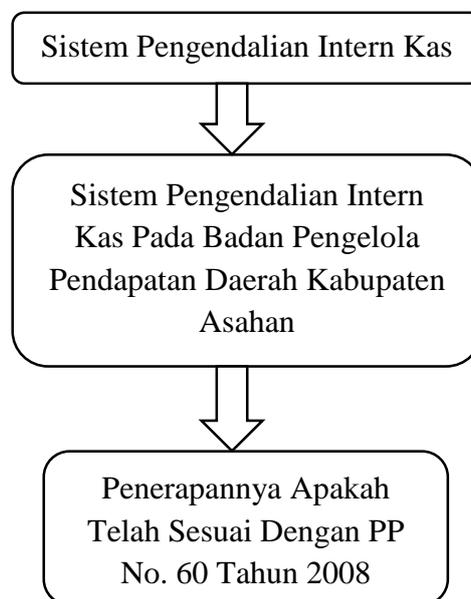
1.	Gabriella Margaretha, 2015 “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung”	Kualitatif	<p>a) Sistem Pengendalian Intern Kas yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung telah efektif dan memadai.</p> <p>b) Pemisahan tugas yang cukup yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah efektif</p> <p>c) Sistem dan prosedur yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung sudah efektif, karena telah memenuhi syarat system prosedur Pengendalian Internal.</p>
2.	Rannita Margaretha, 2013 “Analisis Sistem PengendalianIntern Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Manado	Kualitatif	<p>a) Sistem pengendalian intern pengeluaran kas di PT. Sinar Galesong Prima telah efektif. Dilihat dengan telah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern.</p> <p>b) Sistem pengendalian intern pengeluaran kas di PT. Sinar Galesong Prima belum efektif, karena masih terdapat unsur-unsur pengendalian di dalam perusahaan yang belum sepenuhnya dilakukan, sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan masih sangat besar.</p>

3.	Sendytha Eunike Wowor, 2015 “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Kas Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon.	Kualitatif	a) Sistem pengendalian Intern Kas pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tomohon telah efektif.
----	---	------------	---

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini didasarkan pada landasan teori dan latar belakang masalah yang diuraikan pada Bab 1. Kerangka konseptual adalah tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal adalah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern secara menyeluruh. Hal berikutlah yang mendasari Kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan menerapkan Sistem Pengendalian Internal.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Uraian :

1. Penulis mempelajari dan memahami apa itu Sistem Pengendalian Internal Kas.
2. Selanjutnya penulis melakukan penelurusan bagaimana Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.
3. Setelah itu, penulis melakukan wawancara dengan menggunakan Hasil Daftar Checklist untuk melihat kesesuaian dengan PP. No. 60 Tahun 2008

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *maturalitic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).³²

Dengan kata lain peneliti ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang sebenarnya sedang terjadi, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah Kantor Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan yang beralamat di Jalan Plamboyan Sibogat, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Kodepos 21211. Waktu penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Bulan Agustus 2020 sampai dengan September 2020.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sumber data atau informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya.³³ Objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.³⁴ Dengan demikian, yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 14.

³³ Azhari Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 60.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik Pendekatan Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 86.

kegiatan manajemen pengendalian internal. Adapun objek dalam penelitian ini adalah alur kas masuk serta keluar di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Kabupaten Asahan.

D. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pedoman wawancara yang telah di susun peneliti dengan informan penelitian, yaitu sekretaris, kepala sub bagian keuangan, dan bendahara.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.³⁵ Data sekunder adalah data pendukung penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta melalui dokumen-dokumen serta literatur yang terkait langsung dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh saat peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan. Sedangkan untuk data yang berbentuk dokumen dan literatur adalah data yang diperoleh peneliti dari buku dan internet, serta sumber-sumber yang mendukung dalam penelitian ini. Data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini.

³⁵ Azhari Akmal Tarigan, Dkk “*Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*”, (Medan: La-Tansa Press,tahun), h.35.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Penelitian juga untuk mengetahui obyektivitas dari kenyataan yang ada dilapangan seperti berbagai aktivitas. Observasi dalam penelitian ini termasuk observasi partisipan, maksudnya peneliti terlibat langsung dalam kegiatan dan mengamati secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁷ Dalam proses ini penulisan melakukan wawancara yang tidak berstruktur yaitu melakukan wawancara yang bersifat bebas (berbincang-bincang) dengan tiga (3) orang pegawai kantor Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

Tabel 3.1
Data Narasumber

Nama	Umur	Jabatan	Lama Bekerja
Dewi Tri Astuti, SE	35	Kasubbag Keuangan	± 5 Tahun
Suheti	48	Staff Subbag Keuangan	± 7 Tahun
Nidawati	50	Bendahara Pengeluaran	± 10 Tahun

³⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16.

³⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.³⁸ Adapun dalam pelaksanaan metode ini adalah dengan mencatat data yang ada pada dokumen dokumen, nuku pedoman dan arsip yang ada pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema atau kategori melakukan analisis adalah pekerjaan sulit, memerlukan kerja keras, analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual tinggi, sehingga tiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasanya sama dengan sifat penelitiannya. Tugas peneliti adalah mengadakan analisis tentang data yang diperolehnya agar diketahui maknanya. Namun ada kemungkinan peneliti tidak dapat menemukan implikasi penelitiannya karena masih terlampau dekat dan masih terlampau terlibat dalam kerja lapangan.³⁹

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, hingga

³⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 82

³⁹ Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Cetakan Pertama. Medan: FEBI UINSU PRESS

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya 2010), h 248

datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan *conclusion drawing/verification*.⁴¹

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti marangkum, memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.

2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴²

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode komparatif. Metode komparatif merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan jawaban responden dengan jumlah jawaban responden. Dan hasil analisis digunakan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian dan diproses dengan cara dijumlahkan, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase. Dalam pengolahan data hasil pertanyaan observasi yang penulis sajikan menggunakan pertanyaan tertutup yang memungkinkan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Pilihan jawaban yang diberikan adalah ya dan tidak. Berdasarkan jawaban yang diperoleh dari responden, dilakukan analisis statistik dengan menggunakan rumus Dean J. Champion yang dikutip dari jurnal penelitian oleh Rezhi Febryan yaitu dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut:

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 430.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jawaban "Ya/Setuju"}}{\text{Jumlah Pernyataan}} \times 100\%$$

Untuk keperluan interpretasi hasil perhitungan persentase, Champion mengemukakan bahwa nilai unsur hasil dari perhitungan yang diperoleh melalui unsur tersebut, dideskripsikan dengan berdasarkan unsur penilaian sebagai berikut:

- a. 0% - 25% : Sistem Pengendalian Internal Kas Tidak Sesuai
- b. 26% - 50% : Sistem Pengendalian Internal Kas Kurang Sesuai
- c. 51% - 75% : Sistem Pengendalian Internal Kas Cukup Sesuai
- d. 76% - 100% : Sistem Pengendalian Internal Kas Sangat Sesuai⁴³

⁴³ Rezhi Febryan. "Analisis Audit Operasional dalam Proses Produksi (Studi Kasus Pada PT. Percetakan Manuntung Press Samarinda)" dalam *eJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 3 No 4, 2015, h. 911-922.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Instansi

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092). Dilanjutkan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, yang berpedoman kepada UU Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124). Pokok-pokok Kepegawaian diatur didalam UU Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007, Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Asahan. Untuk menunjang kemajuan Kabupaten Asahan maka dibentuklah beberapa Dinas, yang salah satunya adalah Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Asahan. Seiring dengan perkembangan waktu, kabupaten Asahan semakin lebih baik lagi, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, maka dibentuklah/diubah menjadi Dinas Pendapatan (Dispenda) Asahan.

2. Visi Dan Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

a) Visi Badan Pengeola Pendapatan Daerah Kabupaten Asaha

Adapun visi dan misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah:

Dalam menjalankan fungsinya Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan mempunyai visi yaitu “Terwujudnya Profesionalisme Pengelolaan Pendapatan Daerah Menuju Asahan Mandiri”

b) Misi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis keimanan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan sisitem pengelolaan pendapatan daerah;
3. Meningkatkan penggalian potensi pendapatan daerah serta mendorong kesadaran masyarakat membayar pajak;
4. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

3. Struktur Organisasi

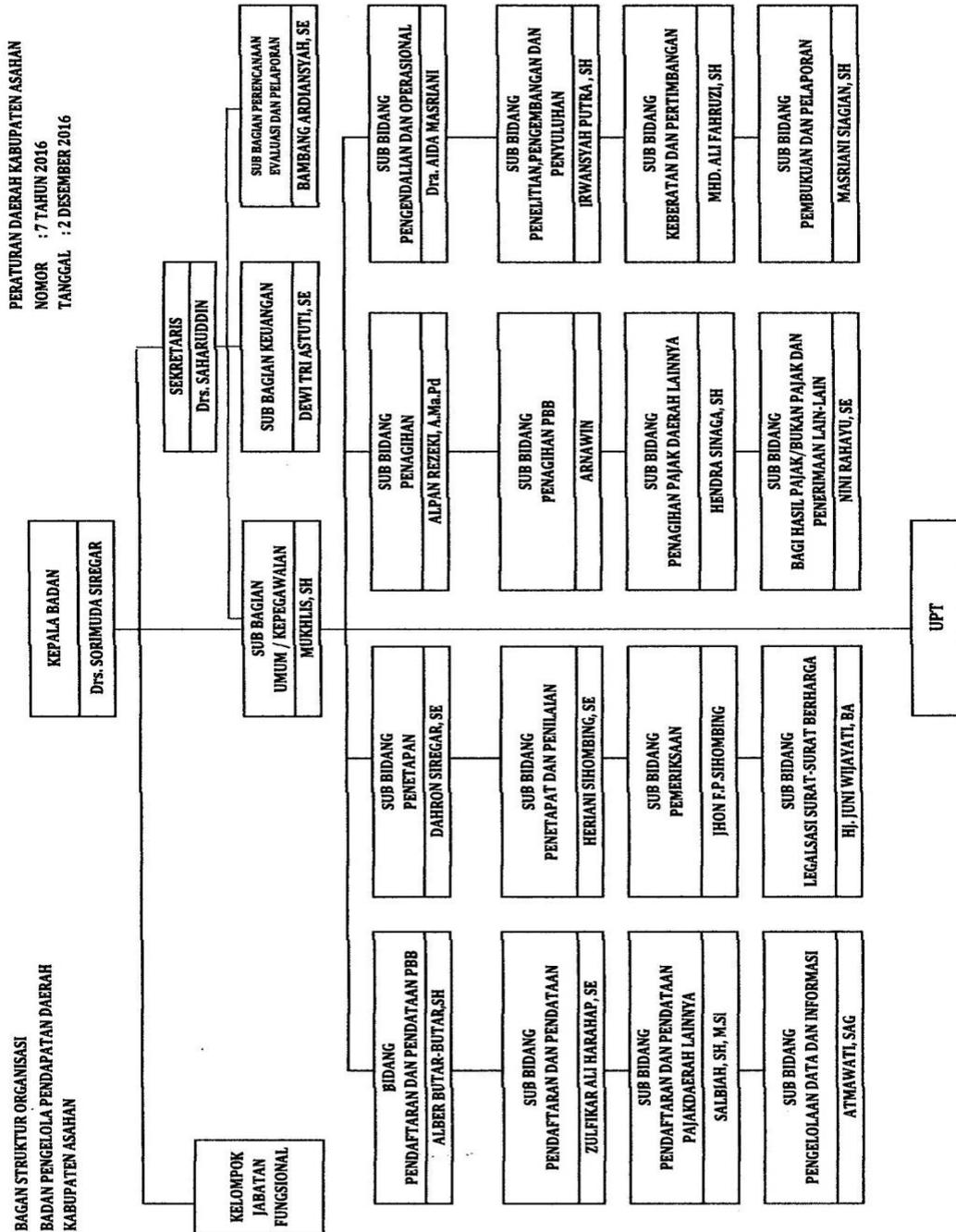
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan adalah instansi yang bertugas membantu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Asahan dalam menentukan kebijaksanaan di bidang pendapatan daerah Kabupaten Asahan serta pelaksanaannya.

Badan berada dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Asahan sesuai dengan perda No. 7 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016. Untuk melaksanakan tugas-tugas diatas maka diperlukan system organisasi dan manajemen yang sangat mantap.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan:

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum/Kepegawaian;

- b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - c) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.
- 4) Bidang Penetapan, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penetapan dan Penilaian;
 - b) Sub Bidang Pemeriksaan;
 - c) Sub Bidang Legalsasi Surat-surat Berharga.
- 5) Bidang Penagihan, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penagihan PBB;
 - b) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya;
 - c) Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Penerimaan Lain-lain.
- 6) Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari:
- a) Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan;
 - b) Sub Bidang Keberatan dan Pertimbangan;
 - c) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- 7) UPT



Gambar 4.1

Struktur Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016

Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Defenisi sistem pengendalian intern tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut diatas berlaku baik dalam perusahaan mengolah informasi secara manual, dengan mesin pembukuan maupun dengan unsur-unsur.⁴⁴

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan

a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan

Kas merupakan aset yang paling lancardibanding aset lainnya. Oleh sebab itu, kas merupakan aset yang paling digemari untuk dicuri, dimanipulasi, dan diselewengkan. Dalam neraca, kas selalu disajikan pada urutan pertama, setelah itu diikuti akun piutang usaha, dan seterusnya sesuai urutan tingkat likuiditasnya.⁴⁵ Karena sifatnya yang sangat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya, maka kas mudah digelapkan. Perlu diadakan pengawasan yang ketat terhadap kas. Pada umumnya suatu sistem pengawasan internal terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Tanpa adanya pemisahan fungsi seperti diatas, akan mudah menggelapkan uang kas.

Sistem informasi dan pengendalian kas dapat memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu tentang kondisi dan aliran kas, seperti jumlah kas ditangan, tagihan, pembayaran, dan prediksi terhadap aliran kas dari pendapatan dan untuk belanja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di

⁴⁴ Seprida Hanum, *Sistem Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h. 59.

⁴⁵ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 20.

butuhkan sistem informasi yang memadai, baik secara formal maupun informal.

Sistem pengendalian internal memiliki struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.⁴⁶

Untuk itu dalam sebuah organisasi prosedur pengendalian internal kas merupakan unsur yang sangat diperlukan bagi perusahaan. Sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari: struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang bertanggung jawab. Oleh karena itu secara mendalam peneliti telah melakukan wawancara terhadap pihak instansi tentang bagaimana penerapan sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan, sudahkah sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap unsur-unsur pengendalian internal kas adalah sebagai berikut:

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ibu Dewi Kasubbag keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan dasar yang utama. Didalam suatu instansi pimpinan wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjanya.

⁴⁶ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 163.

“Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, responden menyatakan bahwa lingkungan pengendalian terkait dengan struktur organisasi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas, namun dalam hal pemisahan fungsi kas instansi tidak menerapkan fungsi penerimaan kas, yang ada hanya fungsi pengeluaran dan fungsi pencatatan.”⁴⁷

Struktur organisasi menggambarkan pembagian otorisasi dan tanggung jawab pada perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Penerapan otorisasi dan tanggung jawab sangatlah penting bagi sebuah organisasi untuk memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas. Tanpa deskripsi pekerjaan yang jelas, maka dapat menyebabkan terjadinya saling lempar tanggung jawab.

b. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko. Perkiraan resiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resiko yang berhubungan dengan pengendalian intern. Resiko yang ada disebutkan oleh unsur faktor intern dan extern.

Selain itu ibu Suheti, Staff Subbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan mengatakan:

“Bahwa perubahan peraturan dapat mengakibatkan risiko yang berbeda. Akan tetapi pihak instansi berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi terjadinya risiko yang ada khususnya kas. Untuk menanggulangi terjadinya resiko Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan menerapkan: penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikannya, seluruh dokumen pendukung di cap “Lunas” setelah transaksinya selesai dibayar, bagian arsip dana selalu memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan pengeluaran kas, tersedianya lemari

⁴⁷ Dewi, Kasubbag keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 24 September 2020.

berangkas untuk menyimpan uang tunai, dan semua nomor check yang keluar dipertanggung jawabkan oleh bagian keuangan.”⁴⁸

Tentunya dalam suatu perusahaan maupun instansi, setiap pengendalian internal pasti akan melakukan penilaian terhadap resiko yang terjadi pada suatu organisasi baik dalam penerimaan pegawai baru maupun kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan Pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko. Pada kegiatan ini dilakukan penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan tindakan mengatasi resiko tersebut telah dilaksanakan dengan efektif.

Kegiatan Pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk-petunjuk dari manajemen telah dilaksanakan. Pengeluaran kas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan untuk perjalanan dinas masing-masing bidang dalam membantu Bupati dalam Pengelola Pendapatan Daerah. Akibat dari seringnya terjadi transaksi pengeluaran kas sehingga diperlukan evaluasi dan tinjauan oleh pimpinan instansi. Adapun kegiatan pengendalian meliputi:

1) Pelaksanaan Riview

Review kerja ditujukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan suatu pekerjaan.

Ibu Nidawati, Bendahara Pengeluaran BAPPENDA Kabupaten Asahan juga mengatakan:

“Tinjauan ulang dilakukan oleh kepala instansi walaupun tidak teratur setiap bulannya. Setiap penerimaan dan pengeluaran kas dicatat

⁴⁸ Suheti, Staff Subbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 24 September 2020.

*ke dalam Buku Kas Umum sesuai dengan klasifikasinya disertai dengan bukti atau dokumen pendukung lainnya.*⁴⁹

2) Pengendalian Fisik

Ibu Suheti mengatakan bahwa pengendalian fisik meliputi penyimpanan dokumen dokumen, catatancatatan serta barang jaminan ke dalam lemari yang terkunci atau kedalam ruangan yang aman.

*“Instansi ini menyediakan berangkas untuk menyimpan dokumen-dokumen penting dan uang tunai. Tetapi untuk saat ini tidak ada uang tunai di dalam berangkas, karena seluruh uang tersimpan di Bank maka dari itu setiap transaksi pengeluaran kas melalui transfer.”*⁵⁰

3) Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dilakukan agar masing-masing pegawai tidak melakukan tugas yang tidak sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

*“Sampai sejauh ini instansi memiliki pemisahan fungsi dan tugas secara baik, bisa dilihat dari struktur organisasi yang meliputi sub-sub bagian yang telah ditetapkan pimpinan dan semua berjalan dengan baik.”*⁵¹

d. Informasi dan Komunikasi

Seprida Hanum, Sistem Informasi Akuntansi Mengatakan:

*Informasi harus diidentifikasi diproses, dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Sistem informasi akuntansi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang handal.*⁵²

⁴⁹ Nidawati, Bendahara Pengeluaran BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 24 September 2020.

⁵⁰ Suheti, Staff Subbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 24 September 2020.

⁵¹ Suheti, Wawancara.

⁵² Seprida Hanum, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Bandung: Citapustaka Media, 2015), h.

Untuk mencapai pengendalin intern yang efektif, maka informasi dan komonikasi harus berjalan dengan baik. Diantaranya dengan pencatatan informasi yang baik, panduan kebijakan yang tercantum pada BAPPENDA Kabupaten Asahan dan laporan keuangan yang disusun secara priodik. Unsur-unsur dari informasi dan komunikasi yang ada di BAPPENDA Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah

*“Bagian akuntansi telah menyusun dan mencatat semua transaksi yang sah misalnya transaksi yang memiliki bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi serta sesuai dengan waktu terjadinya transaksi yang dicatat. Kemudian hasil pekerjaannya diperiksa oleh kasubag keuangan. Sehingga menghasilkan informasi yang memadai dan tepat waktu. Informasi tersebut membantu melaksanakan pengendalian intern di instansi dan proses pengambilan keputusan oleh pimpinan.”*⁵³

b. Pengklasifikasian transaksi keuangan

*“Bagian pencatatan tidak selalu mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pada saat transaksi tersebut terjadi sehingga waktu yang terdapat dalam kwitansi tidak sesuai dengan buku pengeluaran kas. Namun dengan adanya nomor urut tercetak dapat berfungsi sebagai tanda dalam pengarsipan dan mempermudah dalam pencatatan.”*⁵⁴

c. Komunikasi

Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan menjelaskan bahwa:

“Komunikasi di dalam berorganisasi baik secara lisan yang berupa tindakan yang dilakukan oleh manajemen maupun tulisan yang berupa laporan pertanggung jawaban telah berlangsung dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kas, sehingga dapat mempermudah

⁵³ Nidawati, Bendahara Pengeluaran BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 28 September 2020.

⁵⁴ Nidawati, wawancara.

pengendalian intern di BAPPENDA Kabupaten Asahan. Bendahara selalu meminta persetujuan dari bagian keuangan dalam mengeluarkan uang. Kemudian bagian keuangan memeriksa bukti-bukti transaksi dengan uang yang ada dan membuat laporan kepada Kasubag Keuangan. Selanjutnya Kasubag Keuangan membuat laporan dan mempertanggung jawabkan kepada pimpinan.”⁵⁵

e. Pemantauan

Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah.

“Pengawasan terhadap keuangan disini bukan auditor seperti halnya diperusahaan, tetapi inspektorat atau irjen kemendagri. Tugas mereka memeriksa dokumen-dokumen atas transaksi-transaksi yang terjadi di instansi. Dan pengawasan umum pada instansi di lakukan langsung oleh pimpinan terhadap su-sub bagian yang ada didalam instansi ini walaupun tidak selalu dilakukan.”⁵⁶

⁵⁵ Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 28 September 2020

⁵⁶ Suheti, Staff Subbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 28 September 2020.

b. Prosedur Penerimaan Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lainlain pendapatan yang sah.

Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan mengatakan :

”Terkait sumber pendapatan daerah, dalam melaksanakan program, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan mempunyai sumber penerimaan kas hanya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.”⁵⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan dan fungsi APBD pada prinsipnya, sama dengan tujuan dan fungsi APBN.

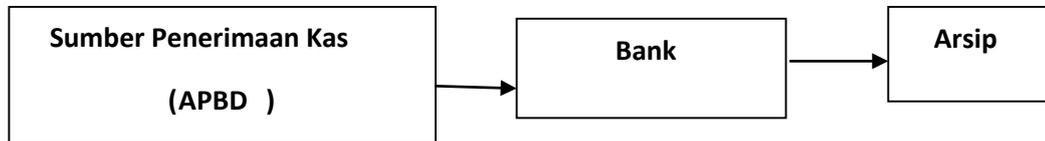
Adapun pengendalian internal yang dilakukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan terhadap penerimaan kas yaitu dengan cara:

- a. Semua penerimaan kas yang berhubungan dengan penerimaan APBD harus diterima oleh pemegang kas.*
- b. Setiap saldo uang kas harus diperiksa oleh pejabat yang berwenang.*
- c. Hanya menyimpan sejumlah uang kas sehubungan dengan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.*
- d. Pada waktu tutup kas, kebenaran buku kas, bukti-bukti pendukung, serta saldo kas yang ada akan diperiksa.⁵⁸*

⁵⁷ Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan Utara, Wawancara di Kisaran pada tanggal 28 September 2020.

⁵⁸ Suheti, Staff Subbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Kisaran pada tanggal 28 September 2020

Berikut adalah skema penerimaan kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan :



Gambar 4.2 Prosedur Penerimaan Kas

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Asahan

Keterangan:

1. Sumber pendapatan. Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 bahwa pendapatan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) hanya berasal dari APBD.
2. Anggaran yang masuk disimpan di rekening kas umum daerah melalui Bank Sumut.
3. Pengarsipan. Setelah semua selesai, kegiatan selanjutnya adalah pengarsipan yang bertujuan untuk menyimpan data dalam unsur-unsur. Arsip data-data transaksi dalam unsur-unsur akan dipergunakan sebagai pedoman untuk melakukan pemeriksaan data-data penerimaan kas.

c. Prosedur Pengeluaran Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan

Pengeluaran kas adalah transaksi-transaksi yang mengakibatkan berkurangnya saldo-saldo kas tunai, atau rekening bank milik perusahaan baik yang berasal dari pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran transfer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya.⁵⁹

Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan mengatakan :

⁵⁹ Alveynurmec, *Akuntansi Pengeluaran kas*.

<http://www.google.co.id/amp/s/alveynur19.wordpress.com/2013/03/29/akuntansipengeluarankas/amp/>

“Pengeluaran kas pada instansi ini digunakan untuk membayar biaya operasi dinas, baik pembayaran non tunai yang dipakai untuk mengatur dan menentukan kebijakan keuangan dan operasi, maupun untuk membayar biaya lainlain seperti biaya kegiatan dan rapat.”⁶⁰

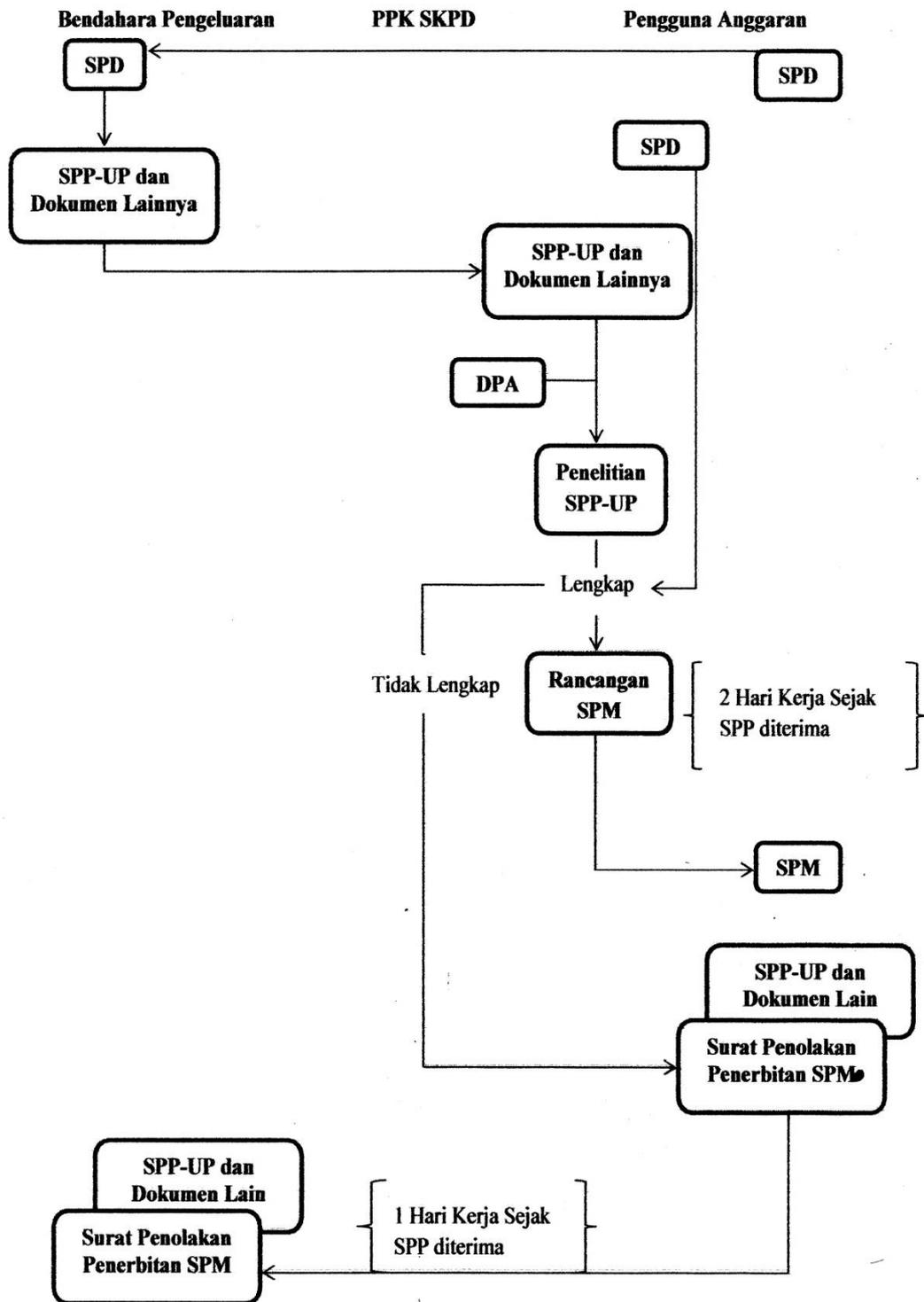
Setiap pengeluaran kas harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung dan dibubuhi tanda tangan pejabat yang berwenang sebelum diotorisasikan. Adapun Pengendalian internal terhadap pengeluaran kas yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

- a. *Seluruh bukti pengeluaran kas bank ditandatangani oleh pemegang kas dan atasan langsung pemegang kas sebagai bukti bahwa pengeluaran kas diketahui dan disetujui.*
- b. *Seluruh transaksi dibuatkan perincian secara menyeluruh*
- c. *Melakukan cek silang oleh pemegang kas dan bidang keuangan untuk melihat apakah ada perbedaan dalam pencatatan.*
- d. *Semua cek harus dibayar sesuai nomor, yang umumnya ditetapkan oleh bank.*
- e. *Semua cek dan kwitansi yang keluar harus dipertanggung jawabkan oleh bagian keuangan.⁶¹*

Berikut adalah prosedur pengeluaran kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Asahan:

⁶⁰ Dewi Tri Astuti, Kasubbag Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan, Wawancara di Medan pada tanggal 28 September 2020

⁶¹ Dewi Tri Astuti, Wawancara.



Gambar 4.3

Bagan Alir Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

{SUMBER : BAPPENDA KABUPATEN ASAHAN}

Uraian :

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK-SKPD
2. Berdasarkan SPD, Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari:
 - Surat Pengantar SPP-UP
 - Ringkasan SPP-UP
 - Rincian SPP-UP
 - Salinan SPD
 - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
 - Lampiran lain (daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja)
3. Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.
4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.
5. SPP-UP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima.
6. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima.
8. Surat Penolakan Penerbitan SPM ini kemudian diberikan PPK-SKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi.
9. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-Up.

Uraian:

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPM kepada Kuasa BUD.
2. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM yang diajukan.
3. Apabila SPM dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM.
4. SP2D ini diserahkan kepada Bank dan Pengguna Anggaran.
5. Kuasa BUD sendiri harus mencatat SP2D dan Nota Debet (Dari Bank) pada dokumen Penatausahaan, yang terdiri dari:
 - Buku Kas Penerimaan
 - Buku Kas Pengeluaran
6. Pengguna Anggaran menyerahkan SP2D kepada Bendahara.
7. Bendahara mencatat SP2D pada dokumen Penatausahaan, yang terdiri dari:
 - Buku Pengeluaran
 - Buku Pembantu Simpanan Bank
 - Buku Pembantu Pajak
 - Buku Pembantu Panjar
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek
8. Apabila SPM dinyatakan tidak lengkap, Kuasa BUD menerbitkan surat penolakan penerbitan SP2D paling lambat 1 hari kerja sejak SPM diterima.
9. Surat penolakan penerbitan SP2D ini diserahkan kepada Pengguna Anggaran agar dilakukan penyempurnaan SPM.

2. Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Kabupaten Asahan dengan Sistem Pengendalian Internal yang terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008

a. Hasil Daftar Checklist Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menilai kesesuaian pengendalian internal kas, penulis menggunakan rumus Dean J. Champion berdasarkan hasil wawancara dengan menggunakan daftar ceklis. Dalam

pengolahan data hasil pertanyaan-pertanyaan observasi yang penulis sajikan adalah Ya dan Tidak serta skor yang diberikan tiap unsur-unsur jawaban adalah Ya = 1 dan Tidak = 0. Hasil yang diperoleh dari daftar ceklis tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Daftar Checklist

No	Keterangan	Jumlah Pernyataan	Jawaban Ya	Jawaban Tidak
1.	Lingkungan Pengendalian	5	3	2
2.	Aktivitas Pengendalian	14	13	1
3.	Penilaian Resiko	6	5	1
4.	Informasi dan Komunikasi	3	2	1
5.	Pengawasan	8	6	2
	TOTAL	36	29	7

Berdasarkan tabel diatas adapun persentase yang diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan rumus Dean J. Champion adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase} &= \frac{\text{Jawaban "Ya/Setuju"}}{\text{Jumlah Pernyataan}} \times 100\% \\
 &= \frac{29}{36} \times 100\% \\
 &= 80,55\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan persentase di atas kesesuaian pengendalian internal berada pada unsur 76-100% yang berarti sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) sudah berjalan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

b. Kelemahan dan Kelebihan Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung kepada pegawai yang bersangkutan terkait dengan sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan bahwa terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan, antara lain:

a. Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan.

Secara umum, Pengendalian Internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Sedangkan Sistem Pengendalian Internal merupakan kumpulan dari pengendalian internal yang terintegrasi, berhubungan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Terdapat beberapa prosedur pengendalian internal yang tidak dijalankan oleh instansi ini yang dapat dikatakan sebagai kelemahan. Kelemahan mengenai sistem pengendalian internal kas yang ada di instansi ini adalah tidak adanya pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan kas dan fungsi pengeluaran kas. Responden mengatakan bahwa:

“Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) merupakan instansi yang rotasinya hanya untuk pengeluaran dan sumber dana juga hanya dari APBD jadi tidak perlu adanya fungsi penerimaan kas lain halnya dengan perusahaan yang sumbernya bisa dari penjualan, piutang, dll.”⁶²

Hal ini bertentangan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang menjelaskan bahwa struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

⁶² Nidawati, Bendahara Pengeluaran BAPPENDA Kabupaten Asahan, wawancara di Kisaran pada tanggal 28 September 2020.

Nidawati menjelaskan bahwa Kelemahan lain yang ada di instansi ini adalah pengawasan terhadap pengendalian internal kas tidak berjalan dengan baik. Responden mengatakan bahwa:

*“Kepala instansi tidak selalu melakukan tinjauan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh fungsi pencatatan. Instansi ini juga tidak selalu melakukan rekonsiliasi bank.”*⁶³

Pimpinan instansi hanya bermodal kepercayaan terhadap pegawainya untuk setiap transaksi karena setiap transaksi pengeluaran harus melalui persetujuan pimpinan yang dilengkapi dokumen-dokumen pendukung sehingga tidak ada kemungkinan untuk menyalahgunakan kas.

b. Kelebihan Sistem Pengendalian Internal Kas Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara

Walaupun terdapat beberapa kelemahan terkait sistem pengendalian internal kas di instansi ini, namun instansi ini dapat menutupi semua kelemahan agar kecurangan dan penyelewengan terhadap kas tidak terjadi.

“Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan ini memiliki prosedur pengeluaran kas yang ketat, dan tahapan untuk mencairkan data sudah dilakukan secara rinci. Contohnya saja setiap permintaan”.

Dapat disimpulkan bahwa setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Seperti sistem pengendalian internal yang terdapat pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan memiliki kekurangan atas unsur-unsur pengendalian yang ada, namun dilihat dari prosedur pengeluaran kasnya sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada di teori sistem pengendalian internal kas sehingga kecil kemungkinan seseorang untuk melakukan penyelewengan terhadap kas instansi.

63 Nidawati, Wawancara.

C. Pembahasan

1. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan definisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari dua pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, penyampaian laporan keuangan tepat waktu dan mengurangi penyimpangan dalam penggunaan anggaran belanja di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, perlu adanya pengendalian intern dimana pimpinan dan pegawai tidak hanya bertindak sebagai pelaksana tetapi juga diharapkan mampu mengawasi pelaksanaan pengendalian intern tersebut secara berkelanjutan.

Adapun unsur-unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 yang terdapat pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan sebagai berikut:

a) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang tercipta dalam suatu unit kerja/satuan kerja yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam menerapkan unsur pengendalian intern, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya.

Pada umumnya, lingkungan pengendalian yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan belum memenuhi unsur-unsur hal ini tercermin dari pelaksanaan unsur-unsur pengendalian internal. Instansi telah memiliki struktur organisasi yang jelas yang menggambarkan uraian tugas yang jelas, namun masih terdapat rangkap jabatan yaitu bagian penerimaan dan pengeluaran kas. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan. tidak menerapkan fungsi penerimaan kas, hal ini dikarenakan sumber penerimaan hanya dari APBD.

b) Perkiraan Resiko Yang Muncul

Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang akan dihadapi oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah, melainkan seluruh pegawai yang ada di dalamnya harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memantau kejadian-kejadian yang akan menghambat pencapaian visi dan misi organisasi. Risiko yang timbul dalam suatu organisasi dapat disebabkan karena adanya unsur internal dan eksternal.

Risiko yang timbul telah diidentifikasi dan dikelola dengan baik oleh instansi, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pengendalian internal dan mengurangi penyimpangan. Hal ini tercermin dari setiap adanya penerimaan pegawai baru disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, seluruh dokumen di cap lunas setelah transaksinya selesai dibayar dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang, bagian arsip dana selalu memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan pengeluaran kas, tersedianya lemari berangkas untuk menyimpan uang tunai, dan semua nomor check yang keluar dipertanggung jawabkan oleh bagian keuangan.

c) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan aktif sebagai suatu bentuk reaksi atas hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga mampu mengurangi risiko yang ada. Kegiatan pengendalian ini mencakup kebijakan maupun prosedur yang ditetapkan oleh pimpinan sehingga membantu

memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan instansi pemerintah telah tercapai.

Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu mengarahkan tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan prosedur. Prosedur yang dimaksud merupakan petunjuk atas rangkaian urutan tindakan dalam melaksanakan kegiatan yang ada, yang disesuaikan sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kegiatan pengendalian yang terjadi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan pengendalian yang terjadi khususnya kas yang dapat dilihat dari prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada instansi sudah berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap transaksi pengeluaran ditinjau langsung oleh pimpinan instansi agar tidak adanya kecurangan yang terjadi dan setiap pengeluaran kas selalu di otorisasi oleh pihak yang berwenang, bagian bendahara juga selalu membuat laporan dalam buku kas umum terkait transaksi yang telah terjadi sesuai nomor urut yang ada di check.

d) Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan hasil dari data yang telah diolah yang akan digunakan sebagai media pengambilan keputusan, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendapat umpan balik. Informasi dan komunikasi yang berkualitas dan efektif dapat mempengaruhi kemampuan pimpinan untuk membuat keputusan yang tepat dan membantu pegawai untuk mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pada akhirnya mampu memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern itu sendiri.

Komunikasi di dalam berorganisasi baik secara lisan yang berupa tindakan yang dilakukan oleh manajemen maupun tulisan yang berupa

laporan pertanggung jawaban telah berlangsung dengan baik, terutama yang berhubungan dengan kas, sehingga dapat mempermudah pengendalian intern di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan. Bendahara selalu meminta persetujuan dari bagian keuangan dalam mengeluarkan uang. Kemudian bagian keuangan memeriksa bukti-bukti transaksi dengan uang yang ada dan membuat laporan kepada Kasubag Keuangan.

e) Pemantauan

Pengendalian intern adalah suatu proses evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menilai kualitas sepanjang waktu dan menentukan apakah pengendalian intern telah berjalan efektif. Pemantauan juga merupakan tindak lanjut atas temuan audit dan evaluasi lainnya sehingga dapat dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Apabila sistem pengendalian intern yang ada dalam instansi pemerintah dipantau secara berkala maka upaya pencapaian misi organisasi atau instansi pemerintah dapat terlaksana dan pada akhirnya dalam jangka panjang visi pun dapat terwujud.

Pemantauan atau pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dilaksanakan oleh sub-sub bagian yang terkait. Misalnya, pengawasan untuk kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan oleh Kasubag Keuangan. Pengawasan secara umum pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap sub-sub bagian yang ada di dalam instansi. Kemudian hasil dari pengawasan tersebut di evaluasi dan di ambil tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan.

Pengawasan yang dilakukan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan terhadap pengendalian internal merupakan pengawasan terhadap:

- 1) Pegawai baru untuk setiap bagian disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya.
- 2) Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen penting.
- 3) Terdapat sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja.
- 4) Mengevaluasi posisi kas yang telah terjadi oleh pimpinan dan hasil evaluasi tersebut dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya.

2. Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal Kas Pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dengan Sistem Pengendalian Internal yang terdapat pada PP No. 60 Tahun 2008

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal kas pada instansi ini belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal yang terdapat pada PP No.60 Tahun 2008 namun jika dilihat secara keseluruhan dari hasil wawancara dalam observasi langsung menggunakan daftar check list rumus Dean J. Champion melalui hasil persentase adalah 80,55% yang berarti sudah sesuai.

Beberapa kekurangannya yaitu tidak adanya pemisahan fungsi antara penerimaan dan pengeluaran kas. Mereka mengatakan bahwa instansi ini hanya melakukan rotasi pengeluaran dana maka tidak perlu adanya fungsi penerimaan kas karena sumber dana hanya dari APBD. Pengawasan juga belum selalu dilakukan oleh pimpinan instansi. Sementara penerapan prosedur pengeluaran kas yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dilaksanakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari menanggulangi penyalahgunaan terhadap kas, yaitu setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ditandatangani pihak yang berwenang dan melalui tahap-tahap pencairan dana yang telah ditetapkan. Terkait judul yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fanda D.P Rundengan dengan judul “Analisis Pendapatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Kas Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado”. Dalam penelitiannya Dinas Pendapatan sudah terdapat pemisahan fungsi antara

penerimaan dan pengeluaran kas. Sumber penerimaan kas yang terdapat di Dinas Pendapatan ini adalah dari Provisi dan Retribusi/PAD. Setiap pengawasan terhadap jalannya kegiatan pengendalian internal juga rutin dilaksanakan oleh pimpinan.⁶⁴

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) kurang menjalani tanggung jawabnya sebagai pimpinan yaitu tidak selalu mengawasi kinerja setiap bidang yang terdapat pada instansi ini. Hal ini tidak sesuai dengan bab sebelumnya tentang pengendalian internal dalam islam yang membahas bahwa falsafah dasar fungsi pengendalian dalam islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.

Pengendalian dalam ajaran islam terbagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pengendalian yang berasal dari diri sendiri yaitu tauhid dan keimanan. Pengawasan internal yang melekat dalam pribadi seseorang akan menjauhi dirinya dari setiap perbuatan penyimpangan dan kecurangan tentunya didasari dengan rasa ketakwaan yang tinggi dan rasa takut kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah melihat segala perbuatan kita. Sejauh ini belum ada pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan yang berani melakukan kecurangan terhadap kas, mereka tetap menjalankan amanah dengan baik.
2. Pengendalian yang berasal dari luar diri sendiri, seperti menciptakan atau membuat kebijakan pada sebuah lembaga atau yayasan melalui pengendalian dari manajemen atau pihak atasan yang ada. Oleh karena manusia berpotensi melakukan kesalahan maka islam menetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan hukum Allah. Artinya, dalam melakukan suatu hal diperlukan adanya bantuan

⁶⁴ Fanda D.P. Rundengan. "Analisis Pendapatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Kas di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado" dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 03 Tahun 2016, h. 367-375.

orang lain karena pengendalian merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap personel dalam suatu organisasi baik pemimpin maupun pegawai. Hal ini sudah dijalankan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan yang dilihat dari struktur organisasi yang sudah cukup lengkap yang terdiri dari beberapa sub-sub bagian dan setiap pegawai sudah menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada umumnya suatu sistem pengawasan internal terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan, dan pencatatan. Tanpa adanya pemisahan fungsi seperti diatas, akan mudah menggelapkan uang kas. Sistem informasi dan pengendalian kas dapat memberikan informasi secara akurat dan tepat waktu tentang kondisi dan aliran kas, seperti jumlah kas ditangan, tagihan, pembayaran, dan prediksi terhadap aliran kas dari pendapatan dan untuk belanja. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di butuhkan sistem informasi yang memadai, baik secara formal maupun informal. Sistem pengendalian internal pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan telah menerapkan sebagian besar unsur-unsur sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, serta karyawan yang bertanggung jawab yang sudah sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan.
2. Hasil dari analisis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai-pegawai yang terkait dengan sistem pengendalian internal kas untuk melihat kesesuaian terhadap unsur-unsur sistem pengendalian yang ada di Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah 80,55% yang artinya sistem pengendalian yang terdapat di instansi ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan dari hasil penelitian, mengenai analisis sistem pengendalian internal kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Asahan adalah sebagai berikut:

1. Agar instansi dapat meningkatkan pengendalian internal kas yang lebih efektif agar harta yang dimiliki oleh instansi bisa tersimpan dengan aman tanpa adanya penyalahgunaan dan kecurangan dengan cara menciptakan pengawasan dan evaluasi yang rutin atau secara berkala prosedur terhadap prosedur pengeluaran kas.
2. Sebaiknya pimpinan instansi melakukan pelatihan kepada para pegawai agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik, dan melakukan pemisahan fungsi penerimaan dengan fungsi pengeluaran kas agar dapat tercipta sistem pengendalian yang lebih baik.
3. Diharapkan setiap rotasi pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai rutinitas yang diterapkan instansi agar setiap transaksi pengeluaran kas langsung dicatat sesuai tanggal terjadinya transaksi.
4. Agar rekonsiliasi bank selalu dilaksanakan secara teratur untuk melihat kesesuaian pencatatan saldo kas yang ada di Bank dengan catatan yang ada di buku kas umum instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan Proses dan Penerapan*. Jakarta. 2015
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktik Pendekatan Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara. 2009
- Akmal Azhari Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Medan: La-Tansa Press. 2011
- Fanda D.P. Rundengan, “*Analisis Pendapatan dan Penerapan Sistem Pengendalian Kas Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado*”. 2016 n
- Gabriella Margaretha, “*Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*”. 2015
- Handoko, T.Hani, *Manajemen*. Yogyakarta. 2009
- Hartadi, Bambang, *Sistem Pengendalian Intern*. Yogyakarta. BPFE. 1999
- Hasibuan, Malayu SP, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta. Bumi Aksara. 2009
- Hery, *Siklus Akuntansi Perusahaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2007
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat. 2009
- Jerry J Weygandt, et. Al, *Accounting Principles* (ed. 7), Terj. Ali Akbar Yulinto, Wasilah, dan Rangga Handika. Jakarta. Salemba Empat. 2007
- Lincoln, Y.S., Guba, E. G, *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills Londo. New Delhi. Sage Publication. 1985
- Mahfiza, “*Penerapan Sistem Pengendalian Intern Kas dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Pengelolaan Kas*”. 2018
- Maisarah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Medan. Akasha Sakti. 2019
- Marom, *Sistem Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta. PT Grafindo. 2002
- Martani, Dwi, dkk, *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta. Salemba Empat. 2016
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (ed.4). Jakarta. Salemba Empat. 2016
- N. A. B. Rahmani, *Metodelogi Penelitian Ekonomi*. Medan. FEBI UINSU PRESS. 2016
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*. Bogor. Galiyah Indonesia. 2011

- Nida Umun Sulisti, “*Analisis Sistem Pengendalian Internal (SPI) Klien Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Audit Laporan Keuangan*”. 2013
- Priska Claudya Homenta, “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara*”. 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta. 2017
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2011
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press. 2005
- Wahyuni, Sumarni. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta. 2009
- Thomas, Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen : Konsep, Aplikasi, dan Pengukuran Kinerja*. Jakarta Barat. PT. Indeks. 2013
- Virasty Fitri F.H, “*Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Prosedur Pemungutan Pajak Penerangan Jalan*”. 2016
- Zaki, Baridwan, *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta. BPFE UGM. 2002

LAMPIRAN

No	PERNYATAAN	Y = Ya	T = Tidak
LINGKUNGAN PENGENDALIAN			
1.	Struktur organisasi di perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara fungsi penerimaan dan pengeluaran kas dan fungsi akuntansi (pencatatan)		√
2.	Struktur organisasi di perusahaan telah memuat secara jelas garis wewenang dan tanggung jawab masing-masing fungsi	√	
3.	Terdapat kebijakan prosedur yang jelas mengenai kepegawaian, pengembangan, penilaian prestasinya, dan kompensasi kepada pegawainya	√	
4.	Rotasi pekerjaan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rutinitas yang diterapkan di instansi		√
5.	Di instansi terdapat pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang jelas dari atasan kepada staffnya, khususnya yang berhubungan dengan penanganan penerimaan & pengeluaran kas disertai instruksi yang baik dan jelas	√	
AKTIVITAS PENGENDALIAN			
6.	Di instansi memiliki prosedur yang mengatur secara jelas mengenai penggunaan formulir-formulir atau dokumendokumen pengelolaan kas	√	
7.	Setiap permintaan pengeluaran kas mendapat persetujuan dari atasan yang mempunyai otorisasi	√	
8.	Setiap permintaan pengeluaran kas dibuatkan perincian menyeluruh	√	
9.	Setiap pengeluaran check mendapatkan otorisasi dahulu oleh pihak yang berwenang	√	
10.	Setiap penandatanganan check selalu memeriksa keberadaan dokumen pendukungnya	√	
11.	Formulir-formulir yang berhubungan dengan penerimaan & pengeluaran kas memiliki nomor urut tercetak	√	

12.	Setiap penerimaan dan pengeluaran kas yang dicatat adalah jumlah uang kas yang benar-benar sudah diterima maupun dikeluarkan	√	
13.	Setiap transaksi pengeluaran kas disertai dengan tanda bukti atau dokumen pendukung	√	
14.	Bagian akuntansi selalu membuat buku harian, posting dan jurnal atas setiap transaksi	√	
15.	Setiap transaksi pengeluaran kas dicatat sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi		√
16.	Dengan adanya nomor urut tercetak berfungsi sebagai tanda dalam pengarsipan dan mempermudah dalam pencatatan	√	
17.	Pencatatan dalam penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan dengan menggunakan komputer	√	
18.	Terdapat program khusus komputer yang dibuat untuk pemrosesan data pengeluaran kas yang terjadi dalam instansi	√	
19.	Untuk memeriksa ketelitian pencatatan kas dilakukan oleh fungsi pemeriksaan internal yang merupakan fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan, penyimpanan kas dan akuntansi	√	
PENILAIAN RISIKO			
20.	Seluruh dokumen pendukung di cap "LUNAS" setelah transaksinya selesai dibayar	√	
21.	Rekonsiliasi bank selalu dilaksanakan secara teratur		√
22.	Bagian bendahara selalu memeriksa dokumen-dokumen terkait dalam pengeluaran kas seperti invoice, faktur pajak, surat penawaran	√	
23.	Tersedianya lemari brankas untuk menyimpan check, giro dan uang tunai untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan	√	
24.	Check / giro yang digunakan menurut nomor urut	√	
25.	Semua nomor check yang keluar harus dipertanggungjawabkan oleh bagian bendahara	√	

INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
26.	Terdapat panduan atau pedoman mengenai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas ?	√	
27.	Informasi yang diperlukan telah dikomunikasikan ke setiap bagian yang terkait guna untuk membantu pekerjaan masing-masing bagian	√	
28.	Saluran komunikasi antar tiap bagian terjalin dengan baik		√
PENGAWASAN			
29.	Pegawai baru untuk setiap bagian disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya	√	
30.	Terdapat pemeriksaan atas kelengkapan dan keabsaan dokumen	√	
31.	Terdapat sanksi untuk pelanggaran yang disengaja	√	
32.	Pimpinan selalu melakukan pengawasan terhadap setiap sub-sub bagian		√
33.	Pimpinan mengevaluasi posisi kas yang telah terjadi	√	
34.	Hasil evaluasi tersebut dijadikan pedoman bagi pimpinan untuk menentukan langkah selanjutnya	√	
35.	Dalam melakukan pemeriksaan internal dilakukan oleh orang yang berpengalaman	√	
36.	Instansi melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan		√

Sumber : Modifikasi dari PP No. 60 Tahun 2008



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
JLN. PLAMBOYAN SIBOGAT TEL.P. (0623) 41243 - 43381
K I S A R A N

Kisaran, 10 Agustus 2020

Nomor : 423.4 / 1077 A
Sifat : Biasa
Lampiran : ---
Perihal : Pelaksanaan Riset.

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

di -

Medan.

1. Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B-1861/EB.I/KS.02/06/2020 tanggal 6 Agustus 2020 hal Izin Riset Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan atas nama :

Nama : Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung
NIM : 0502162105
Smt. / Prodi : IX/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Asahan.

2. Berkenaan hal diatas pada dasarnya menerima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Riset pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan dengan ketentuan dapat mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Demikian disampaikan kiranya dapat dimaklumi.

An.KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
JLN. PLAMBOYAN SIBOGAT TELP. (0623) 41243 - 43381
K I S A R A N

Kisaran, 13 Oktober 2020

Nomor : 423.4 / 1211 A Kepada Yth :
Sifat : Biasa Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Lampiran : --- Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Perihal : **Telah Selesai Melaksanakan** di -
Riset..... **Medan.**

1. Bersama ini disampaikan bahwa nama Mahasiswa Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang tertera dibawah ini telah melaksanakan Riset dari tanggal 12 Agustus 2020 s/d 12 Oktober 2020 di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan atas nama sebagai berikut :

Nama : Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung
NIM : 0502162105
Smt. / Prodi : IX/Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Asahan.

2. Demikian disampaikan kiranya dapat dimaklumi.

An.KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH





Wawancara dengan Bagian Keuangan BAPPENDA Kabupaten Asahan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

- 1. Nama : Muhammad Nabil Al Furqon Marpaung
- 2. NIM : 0502162105
- 3. Tempat/Tgl. Lahir : Kisaran/01 September 1998
- 4. Pekerjaan : Mahasiswa
- 5. Alamat : Jln. Halat Simp. Megawati Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- 1. Tamatan SD Negeri 017973 Kisaran Berijazah Tahun 2010
- 2. Tamatan SMP IT Al Fityan School Medan Berijazah Tahun 2013
- 3. Tamatan MAN 3 Medan Berijazah Tahun 2016